



www.sulut.inews.id

Judul Tugas Akhir Skripsi :

Penetapan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta: Studi Kasus Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nomor: 1517 Tahun 2021

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S.1

Nama: Umar Ali Zain

NIM: 1810413047



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA TAHUN 2023

Penetapan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta: Studi Kasus Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nomor 1517 Tahun 2021

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Awal untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik



Disusun Oleh:

Umar Ali Zain

1810413047

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA**

2023

**PENETAPAN KENAIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DKI
JAKARTA : STUDI KASUS KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA
ANIES BASWEDAN NOMOR: 1517 TAHUN 2021**

**DETERMINING THE INCREASING OF THE PROVINCIAL MINIMUM
WAGE (UMP) FOR DKI JAKARTA: A CASE STUDY OF THE DECREE
OF THE GOVERNOR OF DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN NUMBER:
1517 YEAR 2021**

Oleh:
Umar Ali Zain
1810413047

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada
tanggal seperti tertera di bawah ini

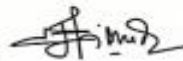
Jakarta, 15 Januari 2023

Pembimbing Utama



Farkhuri, S.P., MA., M.P.P.

Pembimbing Pendamping



Dra. Angela Efanda, M.Si



Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Tahun 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar:

Nama : Umar Ali Zain

NIM : 1810413047

Program Studi : Ilmu Politik

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 18 Januari 2023

Yang menyatakan,



(Umar Ali Zain)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umar Ali Zain
NIM : 1810413047
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penetapan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta: Studi Kasus Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nomor: 1517 Tahun 2021

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Januari 2023
Yang Menyatakan,



(Umar Ali Zain)

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Umar Ali Zain

NIM : 1810413047

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Penetapan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (Ump)
DKI Jakarta : Studi Kasus Keputusan Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan Nomor: 1517 Tahun 2021

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pembimbing I



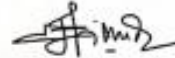
Fakhrul S.IP., MA, M.PP

Penguji I



Dr. Deni Angela, M.IP

Penguji II



Dra. Angela Eflanda, M.Si

Ketua Program Studi



Restu Rahmawati, S.Sos., MA.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 18 Januari 2023

Penetapan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta: Studi Kasus Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nomor: 1517 Tahun 2021

Abstrak

Tujuan penelitian ini membahas Penetapan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta: Studi Kasus Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nomor 1517 Tahun 2021.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teori utama dalam penelitian ini adalah teori multi arus dari John W Kingdon. Teori ini sebagai pisau analisis dalam formulasi kebijakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Hasil dari penelitian ini adalah peran dari aktor seperti pakar, akademisi sebagai aktor pendukung dan peran Pemprov DKI Jakarta dan serikat pekerja/buruh sebagai aktor utama yang mendorong agar perubahan kebijakan mengenai UMP DKI Jakarta tahun 2022. Proses indentifikasi masalah terkait UMP DKI Jakarta merupakan bagian dari arus masalah, pihak Pemprov DKI Jakarta mencoba mengidentifikasi masalah mengenai UMP DKI Jakarta yang ternyata memang kenaikan yang dibawah kata layak. Pemprov mengidentifikasi bahwa upah selama enam tahun terkahir di DKI Jakarta rata-rata 8,6%, kemudian inflasi di DKI Jakarta sebesar 1,14%. Permasalahan tidak terlepas dari pihak serikat pekerja/buruh dengan melihat kebijakan kenaikan UMP DKI Jakarta ini sangat dibawah kata layak. Proses pemilihan kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi 5,1% mengalahkan usulan daripada aktor lainnya. Proses ini merupakan bagian dari arus kebijakan, kenaikan 5,1% menunjukkan bahwa relasi kuasa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap pihak aktor lainnya yang tidak dapat mengintervensi keputusan yang dibuat oleh gubernur. Kenaikan UMP DKI Jakarta tidak terlepas dari arus politik yang memberikan tekanan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dilakukan oleh serikat pekerja/buruh.

Kata Kunci: upah Minimum provinsi, multi arus, formulasi kebijakan

**Determination of DKI Jakarta Provincial Minimum Wage (UMP) Increase:
Case Study DKI Jakarta Governor Anies Baswedan Decree Number: 1517
Year 2021**

Abstract

The purpose of this study is to discuss the Determination of the DKI Jakarta Provincial Minimum Wage Increase: A Case Study of DKI Jakarta Governor Anies Baswedan's Decree Number 1517 of 2021.

The method used is descriptive qualitative. The main theory in this study is the multicurrent theory from John W Kingdon. This theory is used as an analytical tool in the policy formulation of DKI Jakarta Governor Decree Number 1517 of 2021 for the determination of the DKI Jakarta Provincial Minimum Wage of 2022.

The results of this study are the role of actors such as experts, academics as supporting actors and the role of DKI Jakarta Provincial Government and trade unions as the main actors pushing for policy changes regarding DKI Jakarta UMP in 2022. The process of identifying problems related to DKI Jakarta UMP is part of problem flow, the Provincial Government of DKI Jakarta tried to identify problems regarding the DKI Jakarta UMP which turned out to be an increase that was below what was said to be feasible. Pemprov identified that wages for the last six years in DKI Jakarta averaged 8.6%, then inflation in DKI Jakarta was 1.14%. The problem cannot be separated from the workers' unions by looking at the policy to increase the DKI Jakarta UMP which is very under the word feasible. The selection process for increasing the DKI Jakarta UMP to 5.1% defeated proposals from other actors. This process is part of the policy stream, the 5.1% increase indicates that the power relations exercised by DKI Jakarta Governor Anies Baswedan over other actors are unable to intervene in decisions made by the governor. The increase in the DKI Jakarta UMP is inseparable from political currents that put pressure on the Governor of DKI Jakarta Anies Baswedan which was carried out by trade unions.

Keywords: provincial minimum wage, multiple streams, policy formulation

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia - nya yang tak ternilai harganya kepada peneliti sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. yang berjudul Penetapan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta: Studi Kasus Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nomor 1517 Tahun 2021. Skripsi ini diselesaikan sejak bulan Januari akhir 2022 sampai Januari akhir 2023 Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik S-1 pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Proses selama melakukan penulisan, tentu penyelesaiannya tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak yang memberikan bantuan baik materi maupun non-materi. Pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan segenap terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, yaitu ayahanda saya Mokhammad Ngatourrokhman dan ibunda saya Sayekti serta adik saya Faris Ali Rakhman mereka yang selalu menuntun, mendoakan, dan mengorbankan segenap jiwa raga demi kesuksesan peneliti.

Ucapan Rasa Terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Dr. R. Dudy Heryadi selaku Dekan FISIP UPN Veteran Jakarta.
2. Restu Rahmawati, S. Sos, MA M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UPN Veteran Jakarta.
3. Bapak Fatkhuri S.IP., MA, M.PP selaku Dosen Pembimbing I atas sumbangan semangat, waktu, dan pikirannya kepada peneliti dalam penyusunan tulisan ini.
4. Ibu Angela Dra. Angela Efianda, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II atas sumbangan, waktu dan pikirannya kepada peneliti.
5. Bapak Dr. Deni Angela, S.Sos., M.I.P. Selaku Dosen Penguji Ahli atas masukan dan saran dalam perbaikan skripsi.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Politik yang saya hormati tanpa terkecuali, terima kasih atas segala masukan, bimbingan, dukungan moril dan ilmu yang tak ternilai harganya yang telah kalian berikan selama peneliti menempuh studi di UPN Veteran Jakarta.

7. Seluruh narasumber yaitu Bapak Rukun Santoso S.H, Bapak Dedi Hartono S.Sos, M. M, Bapan Winarso, Bapak Purnomo S. H, M. Drs. H. Bapak Nurzaman M. M, Bapak Ahmad Khoirul Umam Ph.D.
8. Keluarga besar Mahasiswa Ilmu Politik.
9. Keluarga besar Yado Fams.
10. Teman dekat saya Randy Davrian Imansyah, M. Atami Ridwan, Adham Ramadhan, M. Raihan, Ahmad Aryo Zidane, Wahid Aldi Nugroho, yang selalu mendukung saya untuk semangat dalam menyusun skripsi ini.

Demikian ucapan ini peneliti sampaikan. Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa terimakasih, mungkin banyak nama yang peneliti tidak bisa sebutkan satu-satu. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta semua pihak yang memiliki kaitan dengan bidang kajian ini.

Jakarta, 10 Januari 2023
Yang menyatakan,

Umar Ali Zain

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS..... | v |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | v |
| Abstrak..... | vii |
| Abstract..... | viii |
| Kata Pengantar | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Penelitian terdahulu..... | 8 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 18 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 18 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 19 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 22 |
| 2.1 Kerangka Teori..... | 22 |
| 2.1.1 Kebijakan Publik..... | 22 |
| 2.1.2 Teori Multiple Stream Fraemwork..... | 23 |
| 2.1.3 Teori Oligarki..... | 27 |
| 2.2 Upah Minimum | 28 |
| 2.2.1 Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta | 29 |
| 2.3Kerangka Berpikir | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 30 |
| 3.2 Subjek Penelitian..... | 30 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |

| | |
|--|-----------|
| 3.4 Teknik Analisis Data..... | 33 |
| 3.5 Triangulasi Data | 34 |
| 3.6 Waktu dan Lokasi | 35 |
| BAB IV HASIL & PEMBAHASAN..... | 36 |
| 4.1 Deskripsi Objek Penelitian..... | 36 |
| 4.1.1 Sejarah Kota Jakarta..... | 36 |
| 4.1.2 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta..... | 37 |
| 4.1.3 Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta..... | 38 |
| 4.1.4 Serikat Pekerja/Buruh | 39 |
| 4.1.5 Asosiasi Pengusaha Indonesia | 40 |
| 4.1.6 Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta | 41 |
| 4.1.7 Upah Minimum Provinsi..... | 46 |
| 4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | 47 |
| 4.2.1 UMP DKI Jakarta Tahun 2022 | 51 |
| 4.2.2. Arus Kebijakan dalam Menetapkan UMP DKI Jakarta Tahun 2022..... | 61 |
| 4.2.3 Arus Politik dalam UMP DKI Jakarta Tahun 2022 | 75 |
| 4.2.4 Jendela Kebijakan | 81 |
| 4.2.5 Pengusaha Kebijakan | 82 |
| BAB V PENUTUP..... | 85 |
| 5.1 Kesimpulan | 85 |
| 5.2 Saran..... | 86 |
| 5.2.1 Saran Praktis | 86 |
| 5.2.2 Saran Teoritis | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 88 |
| Riwayat Hidup..... | 92 |
| Lampiran A | 94 |
| Lampiran B..... | 95 |
| Lampiran C | 98 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Perbedaan Usulan Dan Hasil Putusan UMP DKI Jakarta Dalam 5 Tahun Terakhir | 1 |
| Tabel 3.1 Waktu & Lokasi | 35 |
| Tabel 4.1 Susunan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2019-2022..... | 43 |
| Tabel 4.2 Perbandingan UMP DKI Jakarta Tahun 2021 dengan 2022 | 54 |
| Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta selama 3 Tahun Terakhir Pada Triwulan3..... | 57 |
| Tabel 4.4 Usulan Awal Setiap Pihak Terhadap Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022..... | 63 |
| Tabel 4.5 Kenaikan UMP DKI Jakarta 6 Tahun Terakhir 2016-2022..... | 64 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3.1 Teknik Analisis Data..... | 33 |
| Gambar 4.1 Pelantikan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022..... | 42 |
| Gambar 4.2 Proses Diskusi mengenai usulan tiap unsur terhadap UMP DKI Jakarta..... | 62 |
| Gambar 4.3 Salah Satu Berita yang dilakukan oleh serikat pekerja/buruh untuk menekan Gubernur DKI Jakarta..... | 77 |
| Gambar 4.4 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan duduk bersama para pendemo dari serikat pekerja/buruh untuk mendengarkan aspirasi serikat pekerja/buruh dalam aksi penolakan UMP DKI Jakarta..... | 77 |